



# JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Journal homepage: [www.ejournal.uksw.edu/jeb](http://www.ejournal.uksw.edu/jeb)

ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

## Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia

Dinar Melani Hutajulu<sup>a\*</sup>, Jihad Lukis Panjawa<sup>b</sup>, Fitrah Sari Islami<sup>c</sup>, RR Retno Sugiharti<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; [dinarmelani@untidar.ac.id](mailto:dinarmelani@untidar.ac.id)\*

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; [jipanjawa@untidar.ac.id](mailto:jipanjawa@untidar.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; [fitrachsari@untidar.ac.id](mailto:fitrachsari@untidar.ac.id)

<sup>d</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia; [retno.sugiharti@untidar.ac.id](mailto:retno.sugiharti@untidar.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Artikel dikirim 05-02-2020

Revisi 27-04-2020

Artikel diterima 29-06-2020

**Keywords:**

economic growth, poverty, HDI, inequality, decentralization

**Kata Kunci:**

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, HDI, ketimpangan, desentralisasi

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the determinants of economic growth in the Eastern Indonesia Region after the government implemented the regional autonomy policy in Indonesia. This research covers the original regions and the expansion regions of the Eastern Indonesia Region. This study uses the secondary data from Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik). This study uses cross-sectional data in 2017 that covers 230 districts and cities. This study uses the least square dummy variable in analyzing the data. The analysis shows that there is no difference in economic growth between the original regions and the expansion regions. However, these two regions exhibit different results of the effects of poverty, human development, inequality, and fiscal decentralization on economic growth. In the original regions, the variables of poverty, human development, and fiscal decentralization affect economic growth. Meanwhile, in the expansion regions, only the variables of human development and fiscal decentralization have impacts on the economic growth.*

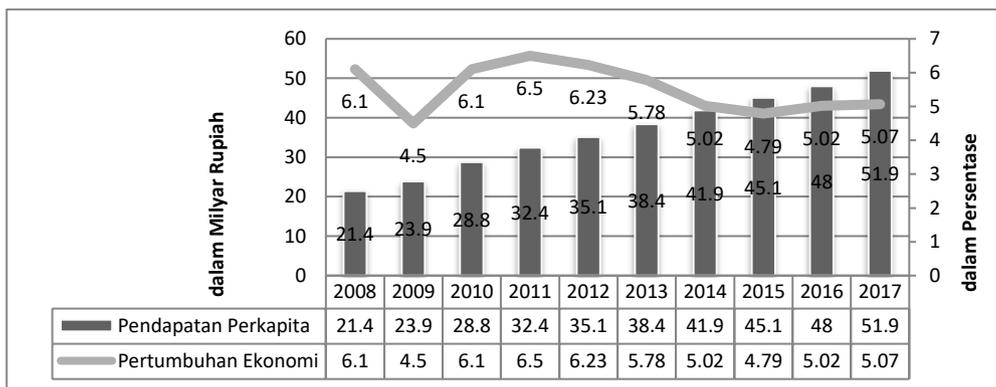
### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia setelah pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini meliputi wilayah induk dan wilayah pemekaran pada kawasan timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari statistik Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *cross-section* pada tahun 2017 yang mencakup 230 kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan *least square dummy variable* dalam menganalisis data. Analisis menunjukkan bahwa tidak ada

perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi pada wilayah induk dan wilayah pemekaran. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan, dan desentralisasi fiskal menunjukkan hasil yang berbeda di setiap daerah. Pada wilayah induk, variabel kemiskinan, pembangunan manusia, dan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada wilayah pemekaran, hanya variabel pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

## PENDAHULUAN

Permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan (Dutu, 2016; Kemenkeu, 2016; Sari, 2015). Perlambatan secara global kemudian berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun karena kinerja ekspor melemah dan harga komoditas dunia yang merosot (Setiawan, 2016; World Bank Group, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)

**Gambar 1**  
**Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Berlaku**  
**dan Pendapatan per Kapita Nominal Indonesia Tahun 2008-2017**

Gambar 1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama satu dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008 hingga 2017 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009, krisis keuangan global yang melanda sempat membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Pada tahun 2013, terjadi penurunan yang disebabkan karena melemahnya nilai tukar rupiah, inflasi dan *capital outflow* yang cukup besar (Septyaningsih, 2017; UGM, 2013). Pada tahun 2014-2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak melambat dan stagnan. Secara nyata, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berisiko kuat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi secara makro dan regional dikarenakan terjadinya inflasi yang kuat di Amerika Serikat, penurunan harga komoditas dalam negeri, dan penurunan

ekspor (Rajah, 2018; World Bank, 2018).

Masalah lainnya adalah ketika Indonesia dihadapkan pada pendapatan per kapita yang terus meningkat dari tahun 2008-2017, namun terlihat ada ketidakseimbangan antara pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi cenderung didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (BPS, 2015). Dalam hal ini, Indonesia terdiri dari dua kawasan yang dibedakan berdasarkan perbedaan pembangunan dan kemajuan daerah dibagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Bappenas, 2015). Pembagian wilayah ini juga didasarkan pada perbedaan kontribusi per wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal KBI (Jamal, 2017). Indikator dalam melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Besarnya PDRB per kapita di KBI tidak seimbang dengan KTI. Hal ini menggambarkan ada beberapa masalah yang terjadi dibalik tidak meratanya pendapatan per kapita di kedua kawasan Indonesia tersebut. Terlihat bahwa KBI memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan merata dibandingkan dengan KTI (lihat Tabel 1).

**Tabel 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Tahun 2014-2017 (dalam Triliun Rupiah) dan Kontribusi per Wilayah (dalam Persentase)**

Daerah	PDRB		Kontribusi	
	2016	2017	2016	2017
Kawasan Barat Indonesia	7882,19	8292,60	81,66	81,68
Sumatera	2044,98	2132,70	21,19	21,00
Jawa	5545,72	5857,60	57,45	57,71
Bali	291,49	302,30	3,02	2,97
Kawasan Timur Indonesia	1770,81	1860,28	18,34	18,32
Kalimantan	807,89	842,96	8,37	8,30
Sulawesi	563,95	603,21	5,84	5,94
Nusa Tenggara	154,20	157,36	1,59	1,55
Maluku dan Papua	244,77	256,75	2,54	2,53
<b>Indonesia</b>	<b>9653,00</b>	<b>10152,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)

Dari kenyataan di atas terlihat bahwa perekonomian Indonesia masih terfokus pada KBI. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kecilnya kontribusi KTI dalam perekonomian Indonesia adalah dengan melaksanakan otonomi daerah pada tahun 2001 yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap daerah lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengembangkan perekonomian wilayah (Sjafrijal, 2012). Secara legal formal, dasar otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi gagasan daerah-daerah untuk

melakukan proliferasi daerah. Kondisi tersebut dominan terjadi pada KTI, di mana banyak daerah memisahkan diri dari daerah induknya.

Dari dasar kebijakan otonomi daerah diatas, perlu kiranya untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi daerah KTI pasca melakukan proliferasi dari daerah induk. Ada beberapa pembahasan yang akan dikaji terkait hal tersebut. Pertama, penelitian ini menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan pemekaran pada KTI. Kedua, penelitian ini menganalisis determinan pertumbuhan ekonomi pada daerah induk dan pemekaran dalam satu model dengan mengasumsikan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen belum tentu sama pada daerah induk maupun daerah pemekaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang penting bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Pertama, bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan keputusan otonomi daerah di daerah KTI dan menjadi sumber informasi mengenai keefektifan penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam hubungannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, penelitian ini berkontribusi bagi pemerintahan kabupaten dan kota di KTI untuk memberikan informasi mengenai masalah apa yang sebaiknya diselesaikan di daerah terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan perencanaan wilayah sebagai bukti empiris tentang ketepatan kebijakan proliferasi dalam memajukan KTI.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan proliferasi di kawasan timur Indonesia dapat dikaitkan dengan teori *Circular and Cumulative Causation* (CCC) yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan mengalir dari pusat ke daerah sekitarnya. CCC merupakan mekanisme dimana terlihat perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan melalui serentetan kejadian yang bersifat kumulatif dan sirkuler (Samudro *et al.*, 2015; Schwardt, 2013; Syawie, 2013). Hal tersebut memberikan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) atau pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah. Masalah yang biasanya timbul dari perbedaan pembangunan yang terjadi di daerah dinyatakan sebagai konvergensi dan divergensi (Kuncoro, 2013; Pratiwi & Kuncoro, 2016). Dalam hal ini, *spread effect* akan menyebabkan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah (Chiang, 2018). Sementara itu, *backwash effect* akan menyebabkan divergensi dan menyebabkan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi serta cenderung mematikan perekonomian daerah di sekitar daerah inti. Hal ini memicu penurunan kesejahteraan dan tertinggalnya daerah tersebut dari segi

kemajuan ekonomi serta teknologi (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011). Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengurangi tingkat ketimpangan dengan melemahkan *backwash effect* dan memperkuat *spread effect* sangat penting (Amalia & Santoso, 2018)

Dikaitkan dengan teori tersebut, maka dalam hal ini KTI telah menerapkan teori di atas dengan berproliferasi menjadi daerah induk dan pemekaran. Dari efek positif yang diharapkan akan terjadi, diduga terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi bagi daerah induk dan daerah pemekaran. Untuk itu diharapkan kebijakan desentralisasi fiskal berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah induk. Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H1:** Ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, secara literatur, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Para ekonom setuju bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik atau negatif (Alvaredo & Gasparini, 2015; Garza-Rodriguez, 2018; Karim *et al.*, 2013; Škare & Družeta, 2016). Studi lain juga menyatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan adanya kemiskinan (Aba *et al.*, 2015). Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H2:** Ada pengaruh yang signifikan antara kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.

Dalam hal pembangunan manusia, teori menunjukkan dampak yang positif yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia sangat diperlukan dalam pencapaian berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, para pemangku kepentingan perlu berevolusi untuk mengembangkan pembangunan manusia pada kebijakan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Eigbiremolen & Anaduaka, 2014; Oluwatobi & Ogunrinola, 2011). Dalam hal ini, memperkuat pembangunan manusia akan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2018; Appiah *et al.*, 2019; Chiappero-Martinetti *et al.*, 2015).

Namun penelitian lain menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam pembangunan manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan kontribusi secara nyata di Indonesia (Purnastuti *et al.*, 2016). Pada tahun 2004-2010 setelah adanya otonomi daerah, percepatan pembangunan manusia terjadi dengan

kecepatan tinggi. Namun tahun 2010-2016 kecepatan pembangunan manusia tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam memantau otonomi daerah di Indonesia. Jika membandingkan pertumbuhan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi antara dua kawasan di Indonesia, KBI memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan KTI karena tingginya pembangunan ekonomi di KBI (Ezkirianto & Findi, 2013). Dengan berproliferasi, diduga pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H3:** Ada pengaruh yang signifikan antara pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.

Variabel lain seperti ketimpangan juga berpengaruh secara positif terhadap PDRB (Affandi *et al.*, 2017). Hal ini terjadi karena tidak meratanya pembangunan pemerintah dan investasi yang dilakukan di daerah tersebut. Fakta menyebutkan bahwa terdapat ketimpangan di Indonesia, dimana kota-kota inti atau kota besar lebih mendominasi (Wilsonoyudho *et al.*, 2017). Dalam hal ini, ketimpangan pembangunan regional juga cenderung memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Fawaz *et al.*, 2014; Mustra, 2017). Ketimpangan selalu meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya ketimpangan akan cenderung menurun karena pertumbuhan ekonomi sudah tinggi dan negara sudah menjadi kaya (Bourguignon, 2015; Cingano, 2014; Shin, 2012).

Penelitian lain mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki hasil yang berbeda-beda di mana ketimpangan dapat berpengaruh secara positif dan negatif tergantung pada kondisinya (Binatli, 2012). Di Papua Barat, penelitian yang dihasilkan menyatakan bahwa pasca kebijakan otonomi daerah, ketimpangan sudah berada pada level medium yang berarti ketimpangan sudah berkurang pasca kebijakan tersebut dan terdapat perbaikan konstruksi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi (Nugraha *et al.*, 2017). Dapat dijelaskan bahwa ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

**H4:** Ada pengaruh yang signifikan antara ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.

Selain beberapa hal diatas, peran desentralisasi fiskal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dinyatakan sebagai bagian penting dari

reformasi fiskal pemerintah (Sanogo, 2019). Namun studi terdahulu menyatakan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia (Khusaini *et al.*, 2018). Pada negara maju seperti Amerika Serikat, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara langsung (Karjoo & Sameti, 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berdampak baik terhadap pertumbuhan dan struktur ekonomi Sulawesi Tengah. Akan tetapi, desentralisasi fiskal menyebabkan masalah ketimpangan yang tinggi (Arham, 2014). Dari kontradiksi diatas, diduga bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

**H5:** Ada pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi baik di daerah induk maupun di daerah pemekaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan tipe *cross-section* yang meliputi kabupaten dan kota di kawasan timur Indonesia tahun 2017. Jumlah observasi sebanyak 230 kabupaten dan kota di kawasan timur Indonesia. Sumber data berasal dari publikasi statistik Indonesia. Adapun data berasal dari buku laporan dengan judul: data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017 (Fatmawati *et al.*, 2018); indeks pembangunan manusia 2017 (Nugroho, 2018); produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2013-2017 (Statistik, 2018); produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2018 (Arinda, 2019); dan statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2017-2018 buku 2 (Statistik, 2019).

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan nilai logaritma PDRB yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 sebagai proksi pertumbuhan ekonomi dengan satuan milyar rupiah.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemiskinan, indeks pembangunan manusia, ketimpangan, dan desentralisasi fiskal. Variabel kemiskinan disimbolkan menjadi POVR yaitu tingkat kemiskinan yang dilihat dari sisi pengeluaran dan diukur dengan menggunakan perhitungan Garis Kemiskinan (GK) dengan satuan persen. Pembangunan manusia disimbolkan menjadi IPM yaitu indeks pembangunan manusia yang dilihat berdasarkan umur panjang dan sehat, pendidikan, dan standar

hidup yang layak dalam satuan angka indeks. Ketimpangan disimbolkan menjadi I yaitu ketimpangan antar daerah yang diukur dengan membandingkan PDRB per kapita kabupaten dan kota terhadap PDRB per kapita provinsi dan dikurangi 1 (satu), dengan satuan angka indeks. Desentralisasi fiskal disimbolkan menjadi FDPAD yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam satuan persen.

### Metode Analisis

Penelitian ini menerapkan metodologi ekonometrik dengan regresi sebagai alat analisis. Model analisis regresi dalam penelitian ini mengadopsi model penelitian Rahman & Chamelia (2015) yaitu model persamaan regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk menunjukkan besar dan arah pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian persamaan tersebut dimodifikasi dengan variabel *dummy* yang berfungsi sebagai variabel independen untuk melihat perbedaan. Penggunaan variabel *dummy* dalam suatu model regresi linier berganda dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi dan status daerah yang berbeda yaitu daerah induk dan pemekaran yang menghasilkan model regresi variabel *dummy* untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan pemekaran pada KTI. Berikut model persamaan regresi variabel *dummy* tersebut.

$$\text{LOG(PDRBK)} = \beta_0 + \beta_1 \text{POVR}_i + \beta_2 \text{IPM}_i + \beta_3 I_i + \beta_4 \text{FDPAD}_i + \beta_5 d1_i \dots\dots\dots 1$$

Dari model diatas maka dibentuklah model persamaan baru untuk menjawab tujuan penelitian mengenai determinan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah induk dan pemekaran. Sehingga model persamaan regresi variabel *dummy* adalah sebagai berikut.

$$\text{LOG(PDRBK)} = \beta_0 + \beta_1 \text{POVR}_i + \beta_2 \text{IPM}_i + \beta_3 I_i + \beta_4 \text{FDPAD}_i + \beta_5 d1_i + \beta_6 d1 \text{POVR}_i + \beta_7 d1 \text{IPM}_i + \beta_8 d1 I_i + \beta_9 d1 \text{FDPAD}_i + \varepsilon_i \dots\dots\dots 2$$

dimana *i* adalah kabupaten dan kota yang berada pada kawasan timur Indonesia,  $\beta$  adalah parameter (konstanta dan koefisien), POVR adalah tingkat kemiskinan, IPM adalah indeks pembangunan manusia, I adalah ketimpangan antar daerah, FDPAD adalah desentralisasi fiskal, PDRBK adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 dan  $\varepsilon$  adalah *error term*, *d1* adalah variabel *dummy* yang bernilai 1 untuk daerah pemekaran pasca otonomi daerah berdasarkan UU No.22/1999 dan bernilai 0 untuk lainnya (daerah induk). Variabel *dummy* *d1* berfungsi untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan pemekaran KTI pasca otonomi daerah. Sebagai pemahaman bersama bahwa pemetaan daerah pemekaran ditunjukkan dengan undang-undang pembentukan daerah-daerah otonomi yang dipublikasikan oleh

Direktorat Jendral Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Terkait uji pendukung, normalitas dan data outlier, menurut Ghozali (2016), secara filosofi seharusnya data *outlier* dipertahankan jika mampu merepresentasikan dari populasi. Akan tetapi apabila data tersebut tidak mampu menggambarkan observasi dalam penelitian maka harus dibuang karena jika tetap dipertahankan akan menjadi penyebab distribusi tidak normal. Dengan tidak disertakannya data *outlier* diharapkan terpenuhinya distribusi normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mensyaratkan terdistribusi normal untuk residual, homoskedastisitas, dan spesifikasi model tepat. Dalam proses penyesuaian untuk data *outlier* didasarkan pada nilai residual yang ekstrim. Nilai residual ekstrim tersebut tidak disertakan guna terpenuhinya distribusi residual yang normal, sehingga terhindar dari masalah bias atau terpenuhinya *best linear unbiased estimator*.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Regresi variabel *dummy* digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan pemekaran pada KTI serta determinan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah induk dan pemekaran. Namun, sebelum membahas hasil regresi variabel *dummy*, uji asumsi klasik diperlukan untuk memenuhi asumsi *best linear unbiased estimator*.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

<b>Normality Test</b>			
Jarque-Berra	0,689	Prob. Jarque-Berra	0,708
<b>Heteroskedasticity Test (White)</b>			
Chi.square-Statistic	30,473	Prob.Chi_square	0,390
<b>Specification Test (Ramsey Reset)</b>			
F-Statistic	0,293	Prob.F-Statistic	0,745

Uji normalitas, heterokedastisitas dan uji linearitas model pada tabel di atas sudah menunjukkan hasil yang baik. Hasil prob. *Jarque Berra* pada uji normalitas menunjukkan nilai sebesar  $0,708 > \alpha (0,05)$  yang berarti model regresi dinyatakan normal. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai sebesar  $0,390 > \alpha (0,05)$  yang berarti bahwa model di atas telah menunjukkan kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi tersebut. Sementara itu, uji linearitas model menunjukkan nilai sebesar  $0,745 > \alpha (0,05)$  yang berarti bahwa model telah linier. Dengan terpenuhinya uji asumsi klasik dapat dikatakan bahwa model regresi variabel *dummy* telah memenuhi asumsi *best linear unbiased estimator*. Berikut merupakan hasil

analisis data dengan menggunakan regresi variabel *dummy* pada 230 observasi di KTI.

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Linier Berganda dengan Variabel *Dummy***

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.t-stat
C	4,927	4,828	0,000***
POVR	-0,023	-2,477	0,014**
IPM	0,059	4,199	0,000***
I	0,131	0,602	0,547
FDPAD	0,013	2,391	0,017**
d1	1,207	0,926	0,355
d1*POVR	-0,010	-0,878	0,380
d1*IPM	-0,033	-1,816	0,070*
d1*I	0,365	1,600	0,110
d1*FDPAD	0,067	4,028	0,000***
Goodness of Fit			
R-squared	0,694	F-statistic	55,477
Adj.R-squared	0,681	Prob(F-statistic)	0,000***

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan: \*signifikan pada  $\alpha(10\%)$ ; \*\*signifikan pada  $\alpha(5\%)$ ; \*\*\*signifikan pada  $\alpha(1\%)$

Dari tabel hasil analisis regresi diatas, maka dihasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LOG}(PDRBK) = 4,927 - 0,023POVR_i + 0,059IPM_i + 0,131I_i + 0,013FDPAD_i + 1,207d1_i - 0,010d1POVR_i - 0,033d1IPM_i + 0,365d1I_i + 0,067d1FDPAD_i + \varepsilon_t \dots \dots \dots 3$$

## Pembahasan

Merujuk pada tabel 3, terdapat pengaruh secara simultan yang ditunjukkan oleh prob. *F-statistic* yaitu  $0,000 < \alpha (0,01)$ . Secara simultan, variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, ketimpangan dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di KTI baik di wilayah induk maupun pemekaran pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah atau pemekaran wilayah. Dari tabel tersebut juga dilihat bahwa nilai *Adj. R-squared* sebesar 0,681. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, ketimpangan dan desentralisasi fiskal dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia sebesar 68,1 persen dan sisanya sebesar 31,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian.

Dalam menjawab hipotesis pertama, hasil regresi *dummy* variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada kedua wilayah tersebut pasca terjadinya otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai prob. *t-stat* sebesar  $0,355 > \alpha (0,1)$ .

Dari hasil riset dapat dikatakan bahwa pemekaran tidak selalu menunjukkan percepatan dan peningkatan pertumbuhan serta dampak yang positif bagi wilayah yang

melakukan pemekaran. Dalam hal ini, teori *Circular and Cumulative Causation* (CCC) dan *spread effects* belum terjadi secara nyata terlebih bagi wilayah pemekaran. Beberapa hal yang menyebabkan tidak adanya perbedaan tersebut adalah terletak pada nilai PDRB wilayah pemekaran yang ternyata hampir sama jumlahnya dibandingkan wilayah induk. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan baik dari segi administratif pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keuangan tidak terlihat ada perbedaan jika dibandingkan dengan daerah induk. Harapan diberlakukannya pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan lebih majunya wilayah pemekaran tersebut. Namun ternyata wilayah induk dan pemekaran tidak memiliki perbedaan setelah berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal. Dari hasil uji diatas maka hipotesis pertama (H1) ditolak, karena tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah induk dan pemekaran.

### **Pada Wilayah Induk**

Pada daerah induk hasil regresi pada tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan desentralisasi fiskal menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi wilayah induk. Variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terlihat dari nilai prob.t-stat sebesar  $0,014 < \alpha$  (0,05) dengan slope sebesar -0,023. Hal ini menjelaskan pengurangan kemiskinan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Maka hipotesis kedua (H2) diterima, dimana kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk

Dapat dikatakan bahwa pada KTI, kemiskinan di daerah induk berkurang secara nyata. Terlihat di KTI bahwa daerah induk semakin mampu menangani daerahnya dari segi ekonomi, sumber daya manusia, mengatasi kekurangan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Berbagai program yang diberikan pemerintah pada KTI guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan berupa program bantuan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjadi jalan bagi masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai modal penunjang kegiatan berdagang. Di samping itu, bantuan BOS yang sudah semakin lancar telah memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik. Juga peningkatan layanan kesehatan menjadi penunjang sehatnya masyarakat sehingga menunjang lancarnya berbagai aktivitas perekonomian wilayah tersebut.

Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi andil dalam mempermudah berbagai aktivitas masyarakat dan menurunkan berbagai harga-harga barang karena semakin mudahnya akses dan keterjangkauan. Dengan hal ini, masyarakat semakin lancar dalam melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan ekonomi. Hal ini memicu munculnya usaha-usaha kecil pada masyarakat. Sehingga

terjadi penurunan kemiskinan di wilayah induk dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Penurunan kemiskinan pada wilayah induk dapat di lihat pada tabel 4 di lampiran.

Merujuk pada tabel 4 yang terdapat di lampiran, tampak kemiskinan berkurang dan hal ini menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Hal ini sejalan dengan studi Alvaredo & Gasparini (2015); Garza-Rodriguez (2018); Karim *et al.* (2013); Škare & Družeta (2016) bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terbalik atau negatif.

Pada variabel pembangunan manusia di wilayah induk berpengaruh secara positif dan signifikan dengan hasil prob.t sebesar  $0,000 < \alpha (0,01)$  dengan slope 0,059. Maka hipotesis ketiga (H3) diterima, dimana indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Kemampuan wilayah induk menjadi lebih baik dalam mengelola dan mengatasi pembangunan manusia.

Berbagai program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian bantuan beasiswa di timur Indonesia yang semakin meningkat telah membantu perubahan pembangunan manusia kearah yang lebih baik (Bere, 2017; Hutapea, 2019), terlebih pada kawasan Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tiga daerah tersebut merupakan daerah paling tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di timur Indonesia.

**Tabel 5**  
**Data IPM NTT, Papua dan Papua Barat Tahun 2015-2017**

IPM	2015	2016	2017
NTT	62,67	63,13	63,73
Papua	57,25	58,05	59,09
Papua Barat	61,73	62,21	62,99

Sumber: Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah

Akibatny, perbaikan pembangunan manusia dampaknya sangat terasa untuk ketiga daerah tersebut. Perlahan tapi pasti, pembangunan manusia mulai meningkat. Meski demikian, tetap masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk memperbaiki pembangunan manusia di daerah-daerah tersebut agar pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Anwar (2018); Appiah *et al.* (2019); dan Chiappero-Martinetti *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pembangunan manusia memiliki andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ketimpangan di daerah induk pasca berlakunya kebijakan otonomi daerah tidak berpengaruh secara signifikan dengan prob.t sebesar  $0,547 > \alpha (0,1)$ . Maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Ini berarti ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada uji pengaruh variabel desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah induk pasca kebijakan otonomi daerah, ditemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan prob.t-stat  $0,017 < \alpha (0,05)$  dan slope sebesar 0,013. Maka hipotesis kelima (H5) diterima, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah induk. Sanogo (2019) menyatakan memang desentralisasi fiskal adalah bagian penting bagi pemerintahan dalam reformasi fiskal. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain di KTI yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan timur (Arham, 2014).

### **Pada Wilayah Pemekaran**

Jika membandingkan hasil analisis model regresi pada daerah pemekaran, dari keempat variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang signifikan dan dua variabel tidak signifikan. Variabel pembangunan manusia memiliki nilai prob.t-stat sebesar  $0,070 < \alpha (0,1)$  dengan slope -0,033. Ini berarti pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif. Maka hipotesis ketiga (H3) diterima, dimana pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran.

Pertimbangan variabel pembangunan manusia menjadi determinan pertumbuhan ekonomi di wilayah pemekaran memerlukan perhatian khusus. Investasi terhadap pembangunan manusia tidak selalu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti penelitian Purnastuti *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa investasi pemerintah terhadap pembangunan manusia tidak produktif untuk perekonomian daerah.

Sementara itu, variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan nilai prob. t-stat sebesar  $0,000 < \alpha (0,01)$  dengan slope 0,067. Artinya variabel desentralisasi fiskal memiliki dampak signifikan di wilayah pemekaran. Maka hipotesis kelima (H5) diterima, yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran. Keberhasilan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan pada wilayah pemekaran KTI dengan harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak baik. Dengan adanya kebijakan ini, daerah-daerah yang terpuruk pembangunan ekonominya dapat lebih bangkit dan maju dalam

mengatasi daerahnya. Masalah mobilisasi sumber daya alam juga lebih mudah untuk ditingkatkan dan pengelolaan energi dan infrastruktur lebih terarah dengan baik dan peningkatan layanan umum yang semakin baik. Sehingga pada gilirannya hal itu telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran dari adanya kebijakan ini.

Sedangkan variabel kemiskinan dan ketimpangan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah pemekaran. Maka hipotesis kedua (H2) dan hipotesis keempat (H4) ditolak pada wilayah pemekaran atau kemiskinan dan ketimpangan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran. Daerah pemekaran masih harus berusaha keras untuk mengatasi kemiskinan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, efektivitas penggunaan dana masih membutuhkan penanganan agar tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan. Pada variabel ketimpangan, kebijakan pemekaran dan terlaksananya wilayah pemekaran belum memberikan dampak terhadap perbaikan ketimpangan. Padahal diharapkan upaya daerah pemekaran dalam mengatasi masalah ketimpangan akan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengurangan ketimpangan ini akan berdampak baik bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di daerah pemekaran kawasan timur Indonesia.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Dari pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di wilayah induk dan pemekaran di KTI pasca otonomi daerah. Pada wilayah induk pasca pemberlakuan otonomi daerah, yang menjadi determinan pertumbuhan ekonomi adalah variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan desentralisasi fiskal. Sedangkan variabel ketimpangan tidak berpengaruh secara signifikan sehingga hal ini masih perlu ditangani agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin tinggi yang nantinya akan mempengaruhi pembangunan ekonomi wilayah induk. Pada wilayah pemekaran pasca otonomi daerah, yang menjadi determinan pertumbuhan ekonomi adalah variabel desentralisasi fiskal dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kemiskinan dan ketimpangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah pemekaran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu analisis hanya terbatas pada beberapa variabel saja yang dianggap memiliki pengaruh dalam praktik pelaksanaan kebijakan proliferasi wilayah. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat terus mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi pemangku kebijakan, diharapkan dalam memberikan keputusan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik dan keuntungan saja, tetapi juga harus melihat keefektifan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota di KTI dapat membuat pembaharuan pada program-program yang dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan manusia, serta pengelolaan desentralisasi fiskal yang semakin baik. Selain itu, penelitian ini menginformasikan pada ilmu ekonomi pembangunan dan perencanaan wilayah bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki dampak yang signifikan dalam memajukan kawasan timur Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aba, F. X. L., Yussof, O. M., & Mohd, S. B. (2015). Analysis of economic structure in poverty eradication in the province of East Nusa Tenggara Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(2015), 81–88. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.013>
- Affandi, A., Zulham, T., & Gunawan, E. (2017). Pengaruh anggaran pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan terhadap produk domestik regional bruto di provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 174–191. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/10019>
- Alvaredo, F., & Gasparini, L. (2015). Recent trends in inequality and poverty in developing countries. *Handbook of Income Distribution*, 2(2015), 697–805. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59428-0.00010-2>
- Amalia, S. K., & Santoso, D. B. (2018). Convergence analysis of economic growth in East Java. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 11(1), 151–161. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i1.9643>
- Anwar, A. (2018). Empirical analysis of human capital convergence in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 11(2), 306–322. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16053>
- Appiah, M., Amoasi, R., & Idan Frowne, D. (2019). Human development and its effects on economic growth and development. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 101–109. <https://doi.org/10.21632/irjbs.12.2.101-109>
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan desentralisasi fiskal, pergeseran sektoral, dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145–167.

- <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.437>
- Arinda, R. (2019). *Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2015). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Bere, S. M. (2017). Bangun sarana pendidikan, NTT dapat Rp 156 miliar dari kemendikbud. Retrieved April 25, 2020, from [kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud?page=all](https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud?page=all)
- Binatli, A. O. (2012). Growth and income inequality: A comparative analysis. *Economics Research International*, 2012(569890), 1–7. <https://doi.org/10.1155/2012/569890>
- Bourguignon, F. (2015). Revisiting the debate on inequality and economic development. *Revue D'économie Politique*, 125(5), 633–663. <https://doi.org/10.3917/redp.255.0633>
- BPS. (2015). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen, melambat sejak lima tahun terakhir. Retrieved April 25, 2020, from [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id) website: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2015/02/05/1114/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2014-tumbuh-5-02-persen--melambat-sejak-lima-tahun-terakhir.html>
- Chiang, S. hen. (2018). Assessing the merits of the urban-led policy in China: Spread or backwash effect? *Journal Sustainability*, 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su10020451>
- Chiappero-Martinetti, E., Jacobi, N. Von, & Signorelli, M. (2015). Human development and economic growth. In *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics*. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-37138-6>
- Cingano, F. (2014). Trends in income inequality and its impact on economic growth. *OECD Social, Employment, and Migration Working Papers*, (163), 5–59. <https://doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en>
- Dutu, R. (2016). Why has economic growth slowed down in Indonesia? An investigation into the Indonesian business cycle using an estimated DSGE model. *Journal of Asian Economics*, 45, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.06.003>
- Eigbiremolen, G. O., & Anaduaka, U. S. (2014). Human capital development and

- economic growth: The Nigeria experience. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(4), 25–35. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v4-i4/749>
- Ezkirianto, R., & Findi, M. (2013). Analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.14-29>
- Fatmawati, A. D., Prasetyo, A. A., & Winarti, Y. G. (2018). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fawaz, F., Rahnama, M., & Valcarcel, V. J. (2014). A refinement of the relationship between economic growth and income inequality. *Applied Economics*, 46(21), 3351–3361. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.929624>
- Garza-Rodriguez, J. (2018). Poverty and economic growth in Mexico. *Social Sciences*, 7(10), 1–9. <https://doi.org/10.3390/socsci7100183>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutapea, E. (2019). Pemerataan SDM unggul, pemerintah diminta lanjutkan beasiswa bidikmisi di Papua. Retrieved April 25, 2020, from Kompas.com website: <https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/30/16305661/pemerataan-sdm-unggul-pemerintah-diminta-lanjutkan-beasiswa-bidikmisi-di>
- Indonesia, R. (1999). *Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Jamal, A. (2017). Geographical economic concentration, growth and decentralization: Empirical evidence in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(2), 142. <https://doi.org/10.23917/jep.v18i2.2786>
- Karim, K. M., Zouhaier, H., & Adel, B. H. (2013). Poverty, governance and economic growth. *Journal of Governance and Regulation*, 2(3), 19–24. [https://doi.org/10.22495/jgr\\_v2\\_i3\\_p3](https://doi.org/10.22495/jgr_v2_i3_p3)
- Karjoo, Z., & Sameti, M. (2015). Spatial analysis of effect of government expenditures on economic growth. *Regional Science Inquiry*, 7(1), 47–54. Retrieved from <http://www.rsijournal.eu/?p=2603>
- Kemenkeu. (2016). Di tengah perlambatan ekonomi global, pemerintah catat capaian positif sepanjang tahun anggaran 2016. Retrieved April 25, 2020, from [djpbn.kemenkeu.go.id](http://djpbn.kemenkeu.go.id) website: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2652-di->

tengah-perlambatan-ekonomi-global,-pemerintah-catat-capaian-positif-sepanjang-ta-2016.html

- Khusaini, M., Wahyudi, S. T., & Utama, Z. S. (2018). Does trade openness and fiscal policy affect inequality and economic growth? A study in Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 10(2), 215–226. Retrieved from <http://www.rsijournal.eu/?p=3287>
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustra, V. (2017). Who cares about regional inequalities? Effects of fiscal consolidation. *Regional Science Inquiry*, 9(1), 135–144. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>
- Nugraha, Q. S., Wicaksono, A. D., & Wijaya, N. S. (2017). Regional disparity level at West Papua province. *International Journal of Environmental and Agriculture Research*, 3(8), 75–81. <https://doi.org/10.25125/agriculture-journal-ijoe-ar-aug-2017-9>
- Nugroho, A. (2018). *Indeks pembangunan manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Oluwatobi, S. O., & Ogunrinola, O. I. (2011). Government expenditure on human capital development: Implications for economic growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*, 4(3), 72–80. <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n3p72>
- Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. (2016). Analisis pusat pertumbuhan dan autokorelasi spasial di Kalimantan : Studi empiris di 55 kabupaten/kota, 2000 – 2012. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 81–104. <https://doi.org/doi.org/10.21002/jepi.v16i2.574>
- Purnastuti, L., Suprayitno, B., & Sugiharsono. (2016). Does human capital investment matter for growth? Evidence from Indonesia during the fiscal decentralization era. *Regional Science Inquiry*, 8(1), 39–49. Retrieved from <http://www.rsijournal.eu/?p=2766>
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten /kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 88–99. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Rajah, R. (2018). Indonesia's economy: Between growth and stability. In *Lowy Institute Analysis*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-economy-between-growth-and-stability>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan pembangunan wilayah*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Samudro, B. R., Bloch, H., & Salim, R. (2015). The uneven regional pattern of ecological capital in Indonesia: A political economy perspective. *International Journal of Green Economics*, 9(3/4), 258–272. <https://doi.org/10.1504/IJGE.2015.075200>
- Sanogo, T. (2019). Does fiscal decentralization enhance citizens' access to public services and reduce poverty? Evidence from Côte d'Ivoire municipalities in a conflict setting. *World Development*, 113, 204–221. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.008>
- Sari, E. V. (2015). Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke level 4,67 persen. Retrieved April 25, 2020, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150805114222-92-70171/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-melambat-ke-level-467-persen>
- Schwardt, H. (2013). *Institutions, technology, and circular and cumulative causation in economics* (1st ed.). London: Palgrave Macmillan UK.
- Septyaningsih, I. (2017). Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013-2015 melambat? Retrieved April 25, 2020, from [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) website: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcnfx408-mengapa-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-20132015-melambat>
- Setiawan, S. R. D. (2016). BI: 2016, tahun penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Retrieved April 25, 2020, from [Kompas.com](http://Kompas.com) website: <https://money.kompas.com/read/2017/04/27/115243526/bi.2016.tahun.penuh.tantangan.bagi.perekonomian.indonesia>
- Shin, I. (2012). Income inequality and economic growth. *Economic Modelling*, 29(5), 2049–2057. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.011>
- Sjafrijal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: A review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Statistik, B. P. (2018). *Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia 2013-2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Statistik, B. P. (2019). *Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota 2017-2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Syawie, M. (2013). Ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 95–104. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.70>

- UGM. (2013). Perkembangan ekonomi terkini 2013 : III. Retrieved April 25, 2020, from macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id website:  
<https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/perkembangan-ekonomi-terkini-2013-iii/>
- Wilsonoyudho, S., Rijanta, R., Keban, Y. T., & Setiawan, B. (2017). Urbanization and regional imbalances in Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 49(2), 125–132. <https://doi.org/10.22146/ijg.13039>
- World Bank. (2018). *Indonesia economic quarterly : Urbanization for all (english)*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank Group. (2019). *Global economic prospects darkening skies*. Wahington, D.C.: World Bank Publications.

**LAMPIRAN**

**Tabel 4**  
**Data Penurunan Kemiskinan pada Wilayah Induk Kawasan Timur Indonesia**

Nama Daerah	Data Kemiskinan			Nama Daerah	Data Kemiskinan		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
<b>NTB</b>				<b>Sulawesi Utara</b>			
Lombok Barat	17,4	16,7	16,5	Bolaang Mong.	8,63	8,34	8,02
Lombok Tengah	16,3	15,8	15,3	Minahasa	8,8	8,36	7,9
Lombok Timur	19,1	18,5	18,3	Kep.Sangihe	12,3	12,3	11,8
Sumbawa	16,7	16,1	15,3	Kota Manado	5,63	5,24	5,46
Dompu	15,1	14,2	13,4	Kota Bitung	6,87	6,57	6,62
Bima	15,8	15,3	15,1	<b>Sulawesi Tengah</b>			
Sumbawa Barat	17	16,5	16	Banggai	9,84	9,47	9,2
Lombok Utara	34,1	33,2	32,1	Poso	18,2	17,7	17,2
Kota Mataram	10,5	9,8	9,55	Donggala	18,1	18,6	18,2
<b>NTT</b>				Toli-Toli	13,6	13,5	13,3
Sumba Timur	31,7	31,4	31	Kota Palu	7,42	7,06	6,74
Kupang	23,4	23,4	22,9	<b>Sulawesi Selatan</b>			
Timor Tengah Selatan	31,1	29,9	29,4	Kepulauan Selayar	12,9	13,1	13,3
Timor Tengah Utara	25,2	24,1	23,5	Bulukumba	8,15	8,06	7,97
Belu	16,8	15,8	16	Bantaeng	9,53	9,51	9,66
Alor	22,9	22,4	21,7	Jeneponto	15,2	15,5	15,4
Flores Timur	9,66	10,3	10,8	Takalar	9,48	9,35	9,24
Sikka	14,3	14,3	14,2	Gowa	8,27	8,4	8,42
Ende	23,5	23,9	24	Sinjai	9,26	9,41	9,24
Ngada	12,8	12,7	12,8	Maros	11,9	11,4	11,1
Manggarai	23,2	22,5	21,9	Pangkajene Kepulauan	16,7	16,2	16,2
Sumba Barat Daya	30	30,6	30,1	Barru	9,42	9,45	9,71
Kota Kupang	10,2	9,97	9,81	Bone	10,1	10,1	10,3
<b>Kalimantan Barat</b>				Soppeng	8,36	8,45	8,29
Sambas	9,42	8,54	8,59	Wajo	7,66	7,47	7,38
Bengkayang	6,94	7,46	7,51	Sidenreng R.	5,55	5,45	5,32
Kab. Mempawah	5,52	5,75	5,94	Pinrang	8,34	8,48	8,46
Sanggau	4,57	4,51	4,52	Enrekang	13,8	13,4	13,2
Ketapang	11,7	11	11	Luwu	13,9	14,4	14
Sintang	9,33	10,1	10,2	Tana Toraja	12,5	12,4	12,6
Kapuas Hulu	9,66	9,82	9,45	Luwu Utara	13,9	14,4	14,3
Kota Pontianak	5,22	5,55	5,31	Kota Makassar	4,38	4,56	4,59
<b>Kalimantan Selatan</b>				Kota Pare-Pare	6,08	5,73	5,7
Tanah Laut	4,58	4,65	4,6	<b>Sulawesi Tenggara</b>			
Kota Baru	4,62	4,56	4,38	Buton	13,8	13,2	13,5
Banjar	3,26	3,1	2,96	Muna	15,5	15,2	14,9
Barito Kuala	5,37	5,22	5,13	Konawe	16,1	16,1	15,7
Tapin	3,88	3,7	3,77	Kolaka Utara	16,5	17,1	16,2
Hulu Sungai Sel.	6,45	6,29	5,8	Kota Kendari	5,59	5,51	5,01
Hulu Sungai Teng.	5,81	6,18	6,09	<b>Sulawesi Barat</b>			
Hulu Sungai Utara	7,07	6,76	6,65	Majene	15,6	14,9	13,9
Tabalong	6,59	6,35	6,09	Polewali Mandar	18,2	17,1	16,1
Kota Banjarmasin	4,44	4,22	4,19	Mamuju	6,7	6,48	6,88
Kota Banjar Baru	4,9	4,62	4,68				

Nama Daerah	Data Kemiskinan			Nama Daerah	Data Kemiskinan		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
<b>Kalimantan Tengah</b>				<b>Maluku</b>			
Kotawaringin Barat	5,07	4,96	4,52	Maluku Tenggara	25,2	24,8	23,9
Kotawaringin Timur	6,42	6,32	6,24	Maluku Tengah	22,1	21,7	21,2
Kapuas	6,03	5,7	5,32	Kota Ambon	4,38	4,64	4,46
Barito Selatan	5,07	4,58	4,44	<b>Papua Barat</b>			
Barito Utara	5,93	5,38	5,21	Fakfak	27,5	26,7	26
Kota P.Raya	3,91	3,75	3,62	Manokwari	25,3	24,9	24,3
<b>Kalimantan Timur</b>				Sorong	33,4	33,3	32,9
Pasir	8,76	8,68	9,28	<b>Papua</b>			
Kutai Kartanegara	7,99	7,63	7,57	Merauke	11,1	11,1	10,8
Berau	5,33	5,37	5,41	Jayawijaya	39,5	39,7	38,6
Kota Balikpapan	2,91	2,81	2,82	Jayapura	14,7	13,5	13
Kota Samarinda	4,82	4,72	4,77	Nabire	24,4	26	25,4
<b>Kalimantan Utara</b>				Kepulauan Yapen	27,7	27,5	26,8
Bulungan	8,5	8,99	9,93	Biak Numfor	27,2	27	25,4
Kota Tarakan	5,11	5,17	6,32	Kota Jayapura	12,2	12,1	11,5

Sumber : Data sekunder Badan Pusat Statistik, diolah